

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemetaan potensi pajak daerah menggunakan analisis tipologi klassen, pajak daerah pada Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015-2019 yang mempunyai potensi tinggi dan kemampuan pengelolaan juga tinggi terhadap pendapatan pajak daerah (kuadran I), adalah pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak yang mempunyai potensi tinggi namun kemampuan mengelola rendah terhadap pendapatan pajak daerah (kuadran II), adalah BPHTB, dan pajak daerah yang mempunyai potensi rendah namun kemampuan mengelola tinggi terhadap pendapatan pajak daerah (kuadran III) adalah PBB-P2 sedangkan pajak daerah yang potensinya rendah dan kemampuan pengelolaan juga rendah terhadap pendapatan pajak daerah (kuadran IV) ditempati oleh pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak air bawah tanah.
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah kabupaten Belu dengan nilai 43,51%, dan kontribusi terkecil diberikan oleh pajak air bawah tanah 0,11%. Rata-rata total kontribusi pajak daerah pada kabupaten Belu tahun anggaran 2015-2019 sebesar 11,11%. Laju pertumbuhan terbesar diperoleh BPHTB dengan nilai 41,92% sedangkan laju pertumbuhan terendah ditempati oleh pajak air bawah tanah sebesar 0,11%, serta rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah

kabupaten belu tahun anggaran 2015-2019 adalah 14,73%

6.2 Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal-hal sabagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan dalam hal edukasi dan pengembangan sumber daya agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelolah potensi pendapatan yang ada agar dapat meningkatkan sumber pendapatan yang berada di kuadran bawah untuk menduduki kuadran I
2. Pemerintah daerah kabupaten Belu di harapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak yang ada.
3. Pemerintah daerah kabupaten Belu di harapkan mampu menyempurnakan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak.
4. Menyelenggarakan pelayanan publik dengan menerima pembayaran pajak dengan mobil keliling, sehingga dengan adanya pelayanan dengan mobil pajak keliling diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani.2002.*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Dr. Soeparman, Soemahamidjaja. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: AMP YKPN
- Lembaran Negara Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Daerah Otonomi*
- Lembaran Negara Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*
- Lembaran Negara Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.Sumber-Sumber Penerimaan Pajak*
- Lembaran Negara Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Wewenang Pemungutan Pajak Daerah*
- Lembaran Negara Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2010. Pajak dan Retribusi Daerah*
- Mahmudi. 2010.*Manajemen Keuangan Daerah*.Surabaya:Erlangga
- Mardiasmo dan Akhmad, Makhfatih. 2000. *Perhitungan potensi pajak daerah dan Retribusi Daerahdi Kabupaten Magelang.Laporan penelitian*, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.yogyakarta:Andi
- Mardiasmo, 2011.*Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Prihadhi, Endra K. 2004. *My potensi*. Jakarta: Elek Media Komputindo
- Peraturan Bupati Belu Nomor 66 Tahun 2016. *Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu*.
- Siahaan,marihot p..2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sri,Y.Pudyatmoko.2009.*Pengantar Hukum Pajak*.yogyakarta: Andi

Sugiyono. 2011.*metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & B*.Bandung:Alfabeta

Zain, Mohammad, 2005. *Manajemen Perpajakan*, Edisi 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat